

ANALISIS STRATEGI PEMBANGUNAN WILAYAH KABUPATEN MADIUN MELALUI SEKTOR UNGGULAN

Dian Pratiwi, Hartirini Warnaningtyas¹⁾

¹⁾ Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun

Email: pratiwidian.new@gmail.com

Abstract

This research aims to identify the economic leading sectors of Madiun regency in order to give ideas of the condition of economic growth as well as being a material consideration in development planning at the district of Madiun. The used data are secondary data of time series which are derived from the Gross Domestic Regional Product of Madiun regency at period 2010-2013. The analytical tool of this research is Klassen Typology analysis; Location Quotient analysis and Shift Share analysis. By this Klassen typology analysis can be concluded that the advanced sector and rapidly growing sector are agriculture; trades, hotels, and restaurant; and services. Then, using LQ analysis, the basis sectors are agriculture; building sector; trade, hotels and restaurant; and services. Whereas by using Shift Share analysis, the highest growth rate and proportional shift is transportation and communication sector. The sectors that have competitive power among other sectors with Differential Shift Component > 0 is electricity, gas and water utilities.

Keywords: *Leading sectors, Klassen Typology, Location Quotient, Shift Share*

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh kemampuan masing-masing sektor dalam memacu pertumbuhannya. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru, serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999:108).

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah dituntut kreatif untuk mengembangkan berbagai aspek yang dapat dijadikan sektor unggulan daerah tersebut. Sektor swasta sangat berperan dalam

keberhasilan pembangunan. Diharapkan dengan adanya sektor swasta dapat memacu investasi sehingga pertumbuhan perekonomian dapat ditingkatkan yang nantinya akan memberikan multipliyer effect pada aspek-aspek sosial yang lain.

Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu dapat dilihat dari data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB pada dasarnya merupakan nilai tambah (added value) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah dari nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penentu bagi kelangsungan pembangunan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi

dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Karena jumlah penduduk terus bertambah dan berarti kebutuhan ekonomi juga bertambah, sehingga dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Hal ini dapat diperoleh dengan peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahun (Tambunan, 2001:2). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia pada dasarnya terdiri atas 9 (sembilan) sektor, yaitu (1) sektor pertanian; (2) pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik dan air minum; (5) bangunan dan konstruksi; (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan (9) jasa-jasa.

Kabupaten Madiun sebagai salah satu pelaksana otonomi daerah menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan pembangunan daerah. Sektor-sektor yang menjadi unggulan menjadi fokus penopang perekonomian daerah. Dari tabel PDRB dapat diketahui bahwa sektor pertanian menjadi sektor andalan dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Madiun. Sektor pertanian ini tersebar di 15 wilayah kecamatan di Kabupaten Madiun. Sektor industri mengalami peningkatan yang signifikan dengan nilai pertumbuhan tahun 2013 sebesar 5,85% meskipun sektor ini bukan unggulan Kabupaten Madiun.

Tabel 1
PDRB Kabupaten Madiun Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2013 (Juta Rupiah)

SEKTOR/SUB SEKTOR	2010	2011	2012	2013**)
1. Pertanian	1.127.800	1.159.913	1.198.757	1.238.749
2. Pertambangan	15.420	15.634	15.793	16.201

n dan Penggalian				
3. Industri Pengolahan	98.990	103.727	108.936	115.308
4. Listrik, Gas dan Air bersih	28.615	30.898	33.397	36.111
5. Bangunan	99.624	106.755	115.505	125.602
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	992.622	1.091.629	1.198.058	1.306.358
7. Pengangkutan dan Komunikasi	101.311	111.343	121.913	134.487
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	96.010	100.452	106.633	114.026
9. Jasa-jasa	511.210	548.209	579.783	613.482
PDRB DENGAN MIGAS	3.071.607	3.268.564	3.478.780	3.700.327

Pemerintah Daerah perlu membuat prioritas kebijakan agar pembangunan daerah dapat berjalan sesuai rencana. Terkait dengan kebijakan anggaran, penentuan prioritas kebijakan tentang pengeluaran daerah merupakan hal yang penting. Penentuan prioritas kebijakan tersebut dapat diwujudkan salah satunya dengan menentukan sektor-sektor prioritas atau unggulan. Lebih jauh, penentuan prioritas tidak hanya dilakukan pada tingkat sektoral saja, tetapi juga pada tingkat subsektor, usaha, bahkan tingkat komoditi yang layak untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada.

Melihat dari kondisi di atas, pertanyaan yang muncul adalah apakah strategi kebijakan pembangunan telah sesuai dengan perkembangan kontribusi sektoral sehingga memberikan dampak yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan penduduk? Hal ini karena untuk meningkatkan kesejahteraan dengan sumber daya yang terbatas harus diprioritaskan pada sektor yang memberikan *multiplier*

effect paling besar dibandingkan sektor-sektor yang lain.

Penelitian tentang pertumbuhan ekonomi serta peranan sektoral sebelumnya telah banya dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Tri Widodo (dalam Soekarwo, 2015) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor basis dalam kurun 2007-2012 Provinsi Jawa Timur masih dimiliki oleh sektor pertanian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; hotel dan restoran; serta pertambangan dan penggalian. Sedangkan untuk hasil perhitungan analisis shift share menunjukkan bahwa sektor yang mendapat pengaruh dari pertumbuhan ekonomi daerah tertinggi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran; industry pengolahan; dan pengangkutan dan komunikasi. Ini berarti bahwa kinerja ekonomi yang terjadi pada wilayah yang lebih luas (dalam hal ini Provinsi Jawa Timur) Sangat dipengaruhi oleh kinerja ekonomi daerah pendukungnya (dalam hal ini kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur).

Melihat dari kondisi tersebut maka sangat diperlukan penelitian serupa yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan dan kondisi ekonomi sektoral di wilayah Kabupaten Madiun sebagai salah satu Kabupaten Unggulan dan berkontribusi pada pembangunan khususnya Provinsi Jawa Timur.

KAJIAN PUSTAKA

Pembangunan Wilayah

Todaro *dalam* Sirojuzilam (2008:16), mendefinisikan Pembangunan ekonomi adalah proses yang multidimensional, terjadi perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan,

dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Menurut Adisasmita (2008:13), pembangunan wilayah (*regional*) adalah fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja, sumber daya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan (kewiraswastaan), kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.

Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Menurut Tarigan (2002) pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, adapun pertambahan pendapatan masyarakat yang dimaksud yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi di wilayah yang bersangkutan. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil,

artinya dinyatakan dalam harga konstan dan biasanya dapat dilihat dari data PDRB atas dasar harga konstan. Hal itu juga sekaligus menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja dan teknologi) yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah.

Menurut Glasson (1977:86) pertumbuhan regional dapat terjadi sebagai akibat dari penentu-penentu *endogen* ataupun *eksogen*, endogen yaitu faktor-faktor yang terdapat di dalam daerah yang bersangkutan. Eksogen adalah faktor-faktor di luar daerah, atau kombinasi dari keduanya. Penentu *endogen*, meliputi distribusi faktor-faktor produksi seperti tanah,

tenaga kerja, dan modal sedangkan penentu *eksogen* adalah tingkat permintaan dari daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh daerah tersebut.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai produksi (*output*) dikurangi dengan biaya antara (*intermediate cost*). Komponen-komponen nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan kemudian menjumlahkannya akan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor-sektor perekonomian berdasarkan lapangan usaha yang tercakup dalam PDRB, yaitu:

- a. Pertanian.
- b. Pertambangan dan Penggalan.
- c. Industri Pengolahan.
- d. Listrik, Gas dan Air Bersih.
- e. Bangunan/Konstruksi.
- f. Perdagangan, Hotel dan Restoran.
- g. Pengangkutan dan Komunikasi.
- h. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.
- i. Jasa-jasa.

Sektor Unggulan sebagai Alat Strategi Pembangunan Daerah

Sektor unggulan merupakan sektor yang memiliki peran besar terhadap perkembangan ekonomi suatu wilayah.. Sambodo dalam Usya (2006) menyatakan bahwa sektor unggulan memiliki empat kriteria diantaranya: (1) sektor unggulan memiliki laju

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, (2) sektor unggulan memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar, (3) sektor unggulan memiliki keterkaitan antara sektor yang tinggi baik ke depan maupun ke belakang, dan (4) sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi.

Sedangkan menurut Ambardi dan Socia (2002) kriteria mengenai sektor unggulan daerah lebih ditekankan pada komoditas-komoditas unggulan yang bisamenjadi motor penggerak pembangunan suatu daerah, di antaranya:

- a. Komoditas unggulan harus mampu menjadi penggerak utama (*prime mover*) pembangunan perekonomian. Artinya komoditas unggulan dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan, maupun pengeluaran.
- b. Komoditas unggulan mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang (*forward and backward linkages*) yang kuat, baik sesama komoditas unggulan maupun komoditas-komoditas lainnya.
- c. Komoditas unggulan mampu bersaing (*competitiveness*) dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional dan pasar internasional, baik dalam harga produk, biaya produksi, kualitas pelayanan, maupun aspek-aspek lainnya.
- d. Komoditas unggulan daerah memiliki keterkaitan dengan daerah lain (*complementarity*), baik dalam hal pasar (konsumen) maupun pemasokan bahan baku (jika bahan baku di daerah sendiri tidak mencukupi atau tidaktersedia sama sekali).
- e. Komoditas unggulan memiliki status teknologi (*state of the art*)

- yang terus meningkat, terutama melalui inovasi teknologi.
- f. Komoditas unggulan mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya.
 - g. Komoditas unggulan bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, mulai dari fase kelahiran (*increasing*), pertumbuhan (*growth*), puncak (*maturity*) hingga penurunan (*decreasing*). Begitu komoditas unggulan yang satu memasuki tahap penurunan, maka komoditas unggulan lainnya harus mampu menggantikannya.
 - h. Komoditas unggulan tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal.
 - i. Pengembangan komoditas unggulan harus mendapatkan berbagai bentuk dukungan, misalkan dukungan keamanan, sosial, budaya, informasi dan peluang pasar, kelembagaan, fasilitas insentif/disinsentif, dan lain-lain.
 - j. Pengembangan komoditas unggulan berorientasi pada kelestarian sumberdaya dan lingkungan.

Menurut Arsyad (1999:108) permasalahan pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia. Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan ekonomi. Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, ketimpangan ekonomi regional di Indonesia disebabkan karena

pemerintah pusat menguasai dan mengendalikan hampir sebagian besar pendapatan daerah yang ditetapkan sebagai penerimaan negara, termasuk pendapatan dari hasil sumber daya alam dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan/kelautan. Akibatnya daerah-daerah yang kaya sumber daya alam tidak dapat menikmati hasilnya secara layak. Menurut pemikiran ekonomi klasik bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alam akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan di daerah yang miskin sumber daya alam. Hingga tingkat tertentu, anggapan ini masih bisa dibenarkan, dalam artian sumber daya alam harus dilihat sebagai modal awal untuk pembangunan yang selanjutnya harus dikembangkan terus. Dan untuk ini diperlukan faktor-faktor lain, diantaranya yang sangat penting adalah teknologi dan sumber daya manusia (Tambunan, 2001:198).

Perbedaan tingkat pembangunan yang didasarkan atas potensi suatu daerah, berdampak terjadinya perbedaan sektoral dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara hipotesis dapat dirumuskan bahwa semakin besar peranan potensi sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDRB di suatu daerah, maka semakin tinggi laju pertumbuhan PDRB daerah tersebut. Berdasarkan pengalaman negara-negara maju, pertumbuhan yang cepat dalam sejarah pembangunan suatu bangsa biasanya berawal dari pengembangan beberapa sektor primer. Pertumbuhan cepat tersebut menciptakan efek bola salju (*snow ball effect*) terhadap sektor-sektor lainnya, khususnya sektor sekunder. Pembangunan ekonomi

dengan mengacu pada sektor unggulan selain berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi juga akan berpengaruh pada perubahan mendasar dalam struktur ekonomi.

Sektor unggulan adalah suatu bentuk perbandingan, baik itu perbandingan berskala internasional, regional maupun nasional. Pada lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggul jika sector tersebut mampu bersaing dengan sector yang sama dengan negara lain. Sedangkan pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sector di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sector yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik. Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai era otonomi daerah saat ini, di mana daerah memiliki kesempatan dan kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat. Menurut Rachbini (2001) ada empat syarat agar suatu sector tertentu menjadi sector prioritas, yakni (1) sector tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar, sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut; (2) karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif, maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas; (3) harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasilhasil produksi sector yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah; (4) sector tersebut harus berkembang, sehingga mampu member pengaruh terhadap

sector-sector lainnya. Data PDRB merupakan informasi yang sangat penting untuk mengetahui *output* pada sector ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu (provinsi/kabupaten/Kabupaten). Dengan bantuan data PDRB, maka dapat ditentukannya sector unggulan (*leading sector*) di suatu daerah/wilayah. Sektor unggulan adalah satu grup sector/subsector yang mampu mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan di suatu daerah terutama melalui produksi, ekspor dan penciptaan lapangan pekerjaan, sehingga identifikasi sector unggulan sangat penting terutama dalam rangka menentukan prioritas dan perencanaan pembangunan ekonomi di daerah.

Manfaat mengetahui sector unggulan, yaitu mampu memberikan indikasi bagi perekonomian secara nasional dan regional. Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sector lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sector unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (*technological progress*). Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sector unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai kondisi sektoral perekonomian Kabupaten Madiun.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data PDRB Kabupaten Madiun dan Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2013. Data tersebut digunakan untuk menganalisa pertumbuhan per sector, dan untuk melihat bagaimana pola pergeseran sector perekonomian Kabupaten Madiun.
2. Dokumentasi dan data sekunder lain yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian ini berlokasi di Wilayah Kabupaten Madiun, dengan mempertimbangkan keterkaitan antara Kabupaten Madiun dengan Kabupaten dan Kota di sekitarnya sehingga hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dalam menentukan arah pengembangan perekonomian serta strategi pengembangan di wilayah Kabupaten Madiun.

Untuk menjawab permasalahan penelitian, maka digunakan beberapa metode analisis data. Diantaranya:

1. Analisis tipologi Klassen

Tipologi Klassen merupakan salah satu alat analisis ekonomi regional yang dapat digunakan untuk mengetahui klasifikasi sektor perekonomian wilayah Kabupaten Madiun. Analisis *Tipologi Klassen* digunakan dengan tujuan mengidentifikasi posisi sektor perekonomian Kabupaten Madiun dengan memperhatikan sektor perekonomian Provinsi Jawa Timur sebagai daerah referensi. Analisis *Tipologi Klassen* menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut (Sjafrizal, 2008:180):

- a. Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (*developed sector*) (Kuadran I). Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB (si) yang lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan

sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi (s) dan memiliki nilai kontribusi sector terhadap PDRB (ski) yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi (sk). Klasifikasi ini dilambangkan dengan $si > s$ dan $ski > sk$.

- b. Sektor maju tapi tertekan (*stagnant sector*) (Kuadran II). Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB (si) yang lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi (s), tetapi memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (ski) yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi (sk). Klasifikasi ini dilambangkan dengan $si < s$ dan $ski > sk$.
- c. Sektor potensial atau masih dapat berkembang (*developing sector*) (Kuadran III). Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB (si) yang lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi (s), tetapi memiliki nilai kontribusi sector terhadap PDRB (ski) yang lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi (sk). Klasifikasi ini dilambangkan dengan $si > s$ dan $ski < sk$.
- d. Sektor relatif tertinggal (*underdeveloped sector*) (Kuadran IV). Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB (si) yang lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam

PDRB daerah yang menjadi referensi (s) dan sekaligus memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (s_i) yang lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi (s_k). Klasifikasi ini dilambangkan dengan $s_i < s$ dan $s_i < s_k$. Seperti tercantum pada tabel:

Tabel 2
Kuadran Tipologi Klassen

Kuadran I Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (<i>developed sector</i>) $s_i > s$ dan $s_k > s_k$	Kuadran II Sektor maju tapi tertekan (<i>stagnant sector</i>) $s_i < s$ dan $s_k > s_k$
Kuadran III Sektor potensial atau masih dapat berkembang (<i>developing sector</i>) $s_i > s$ dan $s_k < s_k$	Kuadran IV Sektor relatif tertinggal (<i>underdeveloped sector</i>) $s_i < s$ dan $s_k < s_k$

Sumber: Sjafrizal, 2008:180

2. Analisis LQ (Location Quotient)

Untuk menentukan sektor basis dan non basis di Kabupaten Madiun digunakan metode analisis *Location Quotient* (LQ). Metode LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan dari PDRB Kabupaten Madiun yang menjadi pemacu pertumbuhan. Metode LQ digunakan untuk mengkaji kondisi perekonomian, mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian. Sehingga nilai LQ yang sering digunakan untuk penentuan sektor basis dapat dikatakan sebagai sektor yang akan mendorong tumbuhnya atau berkembangnya sektor lain serta berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Untuk mendapatkan nilai LQ menggunakan metode yang mengacu pada formula yang dikemukakan oleh Bendavid-Val dalam Kuncoro (2004:183) sebagai berikut:

$$LQ = \frac{\frac{PDRBM_i}{\sum PDRBM}}{\frac{PDRBJT_i}{\sum PDRBJT}}$$

Di mana:

$PDRBM_i$ = PDRB sektor i di Kabupaten Madiun pada tahun tertentu.

$\sum PDRBM$ = Total PDRB di Kabupaten Madiun pada tahun tertentu.

$PDRBJT_i$ = PDRB sektor i di Provinsi Jawa Timur pada tahun tertentu.

$\sum PDRBJT$ = Total PDRB di Provinsi Jawa Timur pada tahun tertentu.

Berdasarkan formulasi yang ditunjukkan dalam persamaan di atas, maka ada

tiga kemungkinan nilai LQ yang dapat diperoleh (Bendavid-Val dalam Kuncoro, 2004:183), yaitu:

1. Nilai $LQ = 1$. Ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor i di daerah Kabupaten Madiun adalah sama dengan sektor yang sama dalam perekonomian Provinsi Jawa Timur
2. Nilai $LQ > 1$. Ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor i di daerah Kabupaten Madiun lebih besar dibandingkan dengan sektor yang sama dalam perekonomian Provinsi Jawa Timur.
3. Nilai $LQ < 1$. Ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor i di daerah Kabupaten Madiun lebih kecil dibandingkan dengan sektor yang sama dalam perekonomian Provinsi Jawa Timur. Apabila nilai $LQ > 1$, maka dapat disimpulkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian Kabupaten Madiun. Sebaliknya apabila nilai $LQ < 1$, maka sektor tersebut bukan merupakan sektor basis dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak

perekonomian Kabupaten Madiun. Data yang digunakan dalam analisis *Location Quotient* (LQ) ini adalah PDRB Kabupaten Madiun dan Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2013 menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2000.

3. Analisis Shift Share

Analisis *Shift Share* digunakan untuk mengetahui proses pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun dikaitkan dengan perekonomian daerah yang menjadi referensi, yaitu Provinsi Jawa Timur. Analisis *Shift Share* dalam penelitian ini menggunakan variabel pendapatan, yaitu PDRB untuk menguraikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun. Pertumbuhan PDRB total (Y) dapat diuraikan menjadi komponen *shift* dan komponen *share*, yaitu:

- a. Komponen *Provincial Share* (PS) adalah banyaknya pertambahan PDRB Kabupaten Madiun seandainya pertumbuhannya sama dengan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur selama periode studi.
- b. Komponen *Proportional Shift* (P), mengukur besarnya *net shift* Kabupaten Madiun yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor PDRB Kabupaten Madiun yang berubah. Apabila $P > 0$, artinya Kabupaten Madiun berspesialisasi pada sektor-sektor yang pada tingkat Provinsi Jawa Timur tumbuh relatif cepat dan apabila $P < 0$, berarti Kabupaten Madiun berspesialisasi pada sektor-sektor di tingkat Provinsi Jawa Timur pertumbuhannya lebih lambat atau sedang menurun.
- c. Komponen *Differential Shift* (D), mengukur besarnya *net shift* yang diakibatkan oleh sektor-sektor

tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di Kabupaten Madiun dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur yang disebabkan oleh faktor-faktor lokasional *intern*, seperti sumber daya yang baik akan mempunyai *Differential Shift Component* positif ($D > 0$), sebaliknya apabila secara lokasional tidak menguntungkan akan mempunyai *Differential Shift Component* yang negatif ($D < 0$).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis

Kabupaten Madiun terletak di Provinsi Jawa Timur bagian barat dengan batas wilayah:

- Sebelah barat kabupaten Magetan dan Ngawi,
- Sebelah utara Kabupaten Bojonegoro,
- Sebelah selatan kabupaten Ponorogo dan
- Kabupaten Nganjuk di sisi sebelah timur.

Kabupaten Madiun memiliki luas wilayah sebesar 1.037,58 Km² dengan Mejayan sebagai ibukota kabupaten.

b. Wilayah Administrasi

Kabupaten Madiun terbagi atas 15 kecamatan yaitu: Balerejo, Dagangan, Dolopo, Kebonsari, geger, Kare, Madiun, Mejayan, Gemarang, Saradan, Sawahan, Jiwan, Wonoasri, Wungu, Pilangkenceng. Dan terbagi atas 8 kelurahan dan 198 Desa.

c. Topografis

Kondisi topografi kabupaten Madiun pada bagian utara berupa perbukitan, yakni bagian dari rangkaian Pegunungan Kendeng. Bagian tengah merupakan dataran tinggi dan bergelombang, sedang bagian tenggara berupa pegunungan,

bagian dari kompleks Gunung Wilis-Liman.

d. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Madiun 769.497 orang. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah 384.334 orang laki-laki dan 385.279 orang perempuan.

2. Klasifikasi pertumbuhan sektor perekonomian wilayah Kabupaten Madiun

Metode *Klassen Typology* digunakan untuk mengetahui pengelompokan sektor ekonomi dalam Kabupaten Madiun menurut struktur pertumbuhannya. Dengan menggunakan *Matrix Klassen* dapat dilakukan empat pengelompokan sektor dengan memanfaatkan laju pertumbuhan dan nilai kontribusi. Table berikut menyajikan data yaitu berupa rata-rata laju pertumbuhan dan kontribusi sektor PDRB Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Madiun Tahun 2010-2013 dengan Migas.

Tabel 3
Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Sektor PDRB Provinsi Jawa Timur Dan Kabupaten Madiun Tahun 2009-2013

No	Sektor	Provinsi Jawa Timur		Kabupaten Madiun	
		Rata-rata Pertumbuhan (S)	Rata-Rata Kontribusi (Sk)	Rata-Rata Pertumbuhan(Si)	Rata-Rata Kontribusi (Ski)
1	Pertanian	1.59	14.64	3.36	35.03
2	Pertambangan dan penggalan	3.32	2.21	0.91	0.47
3	Industri pengolahan	5.71	25.51	4.89	3.16
4	Listrik gas dan air bersih	4.95	1.34	7.14	0.95
5	Bangunan	9.08	2.59	7.06	3.30
6	Perdag	8.94	33.28	9.25	3.87

	angan, hotel dan restoran				
7	Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	10.57	7.47	5.68	3.09
8	Jasa-jasa	5.45	5.48	6.34	16.67

Pada Tabel terlihat bahwa sektor yang memiliki kontribusi rata-rata paling besar terhadap PDRB Kabupaten Madiun adalah sektor pertanian, lalu diikuti sektor jasa. Untuk pertumbuhan rata-rata, paling besar ditunjukkan oleh sektor perdagangan hotel dan restoran kemudian diikuti sektor listrik gas dan air bersih. Sedangkan sektor yang memiliki pertumbuhan rata-rata paling kecil adalah sektor pertambangan dan penggalan.

Sedangkan secara provinsi, sektor yang memiliki kontribusi rata-rata paling besar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dan yang menyumbangkan kontribusi paling kecil adalah sektor listrik, gas dan air bersih.

Pertumbuhan rata-rata provinsi Jawa Timur yang terbesar adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan yang memiliki pertumbuhan paling kecil adalah sektor pertanian.

1. Analisis Tipologi Klassen

Dengan menggunakan alat analisis tipologi Klassen sektor perekonomian Kabupaten Madiun dapat diklasifikasikan sebagaimana paparan berikut: terdapat tiga sektor yang termasuk dalam kategori sektor maju dan tumbuh dengan pesat, yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa. Sektor-sektor tersebut memberikan

kontribusi rata-rata terbesar terhadap PDRB masing-masing sebesar 35,03%, 33,86% dan 16,67%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang dominan dan menjadi sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB.

2. Analisis LQ (Location Quotient)
Untuk dapat menghitung nilai LQ, maka dibutuhkan data *time series* tentang PDRB Kabupaten Madiun sebagai daerah fokus penelitian, data PDRB Provinsi Jawa Timur sebagai daerah referensi kemudian dengan data tersebut nilai LQ dapat diketahui.

Tabel 4
Nilai LQ per sektor

SEKTOR	2010	2011	2012	2013	LQ RATA-RATA
1. Pertanian	2.45	2.47	2.49	2.54	2.49
2. Pertambangan dan Penggalian	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21
3. Industri Pengolahan	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
4. Listrik, Gas dan Air bersih	0.69	0.70	0.72	0.75	0.71
5. Bangunan	1.01	1.00	1.02	1.02	1.01
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.04	1.05	1.06	1.06	1.05
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0.57	0.56	0.55	0.55	0.56
9. Jasa-jasa	1.86	1.91	1.94	1.95	1.91

Kriteria sektor perekonomian berdasarkan nilai LQ ditunjukkan sebagai berikut:

1. Nilai $LQ = 1$. Ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor *i* di daerah Kabupaten Madiun adalah sama dengan sektor yang sama dalam perekonomian Provinsi Jawa Timur
2. Nilai $LQ > 1$. Ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor *i* di daerah

Kabupaten Madiun lebih besar dibandingkan dengan sektor yang sama dalam perekonomian Provinsi Jawa Timur.

3. Nilai $LQ < 1$. Ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor *i* di daerah Kabupaten Madiun lebih kecil dibandingkan dengan sektor yang sama dalam perekonomian Provinsi Jawa Timur Apabila nilai $LQ > 1$, maka dapat disimpulkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian Kabupaten Madiun. Sebaliknya apabila nilai $LQ < 1$, maka sektor tersebut bukan merupakan sektor basis dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian Kabupaten Madiun.

Berdasarkan pengelompokan tersebut maka dapat diketahui bahwa sektor yang dikategorikan sebagai sektor basis adalah: sektor pertanian; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; dan sektor jasa-jasa. Sektorsektor tersebut memiliki nilai $LQ > 1$ yang berarti bahwa bahwa tingkat spesialisasi sektor *i* di daerah Kabupaten Madiun lebih besar dibandingkan dengan sektor yang sama dalam perekonomian Provinsi Jawa Timur.

3. Analisis Shift Share

Dengan menggunakan analisis Shift share secara umum laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun mengalami pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 20,47% dengan tahun 2010 sebagai tahun dasar dan tahun 2013 sebagai tahun akhir penelitian. Namun laju pertumbuhan Kabupaten Madiun tersebut masih lebih rendah dibanding laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dengan selisih

sebesar 2,07%. Perekonomian Kabupaten Madiun menunjukkan perkembangan yang positif. Pertumbuhan tertinggi dari Kabupaten Madiun terdapat pada sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 32,75%.

Pertumbuhan sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Madiun dipengaruhi oleh tiga komponen pertumbuhan wilayah yaitu Komponen Pertumbuhan Provinsi (KPP), Pertumbuhan Proporsional (PP), dan Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW).

Pertumbuhan regional/provinsi digunakan untuk menjelaskan kebijakan ekonomi regional (Jawa Timur) yang mempengaruhi perekonomian ditingkat kabupaten/kota, dalam hal ini adalah Kabupaten Madiun. Berdasarkan Pertumbuhan Proporsional (PP) sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Madiun ada yang memberikan nilai kontribusi secara positif maupun negatif. Sektor yang memiliki pertumbuhan proporsional yang positif jika $PP > 0$, yaitu sektor bangunan sebesar 4,41 %, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 8,25%, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 11,94 %, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 2,70 %. Artinya keempat sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan yang cepat.

Tabel 5
Komponen Pertumbuhan Wilayah Kab. Madiun (Juta Rp)

Sektor	KPP	PP	Persen	PPW	Persen
	$(Ra) * Y_{ij}$	$(Ri - Ra) * Y_{ij}$	$(PP) / Y_{ij} * 100\%$	$(ri - Ri) * Y_{ij}$	$(PPW) / Y_{ij} * 100\%$
1	259.394	-171.495	-15,2	23.049	2,04
2	3.546	-1.677	-10,8	-1.088	-7,05

3	22.767	-3.862	-3,9	-2.587	-2,61
4	6.581	-1.376	-4,8	2.289	8,00
5	22.913	4.396	4,4	-1.332	-1,33
6	228.303	81.943	8,2	3.489	0,35
7	23.301	12.095	11,9	-2.221	-2,19
8	22.082	2.596	2,7	-6.662	-6,93
9	117.578	-34.423	-6,7	19.117	3,73
TOTAL	706.469	-111.802	-14,2	34.052	-6,01

Sektor yang mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB jika $PP < 0$, yaitu sektor pertanian (-171,49 %), sektor pertambangan dan penggalian (-1,68%), sektor industri pengolahan (-3,86%), sektor listrik, gas dan air bersih (-1,37%), dan sektor jasa-jasa (-34,42). Artinya, kelima sektor tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang lambat.

Selanjutnya, untuk mengetahui komponen pertumbuhan wilayah lain adalah Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW). Komponen PPW timbul karena peningkatan atau penurunan PDRB atau kesempatan kerja dalam suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Jika $PPW > 0$ maka sektor yang bersangkutan memiliki daya saing yang baik bila dibandingkan dengan wilayah lainnya yang ada di Provinsi Jawa Timur. Adapun sektor yang memiliki daya saing yang baik adalah sektor pertanian sebesar 2,04 %, sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 8%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 0,35%, dan sektor jasa-jasa 3,74%. Sedangkan sektor yang memiliki daya saing yang tidak baik jika $PPW < 0$ adalah sektor pertambangan dan penggalian (-7,06%), sektor industri pengolahan (-

2,61%), sektor bangunan (-1,38%), sektor pengangkutan dan komunikasi (-2,20%), serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (-6,94%).

Pergeseran bersih diperoleh dari hasil penjumlahan antara Pertumbuhan Proporsional (PP) dan Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) di setiap sektor perekonomian. Apabila $PB > 0$, maka pertumbuhan sektor perekonomian Kabupaten Madiun termasuk ke dalam kelompok yang progresif (maju). Sedangkan $PB < 0$, artinya sektor perekonomian Kabupaten Madiun termasuk kelompok yang lamban.

Tabel 6
Pergeseran Bersih Sektor Perekonomian Kabupaten Madiun

No.	Sektor	Pergeseran Bersih (PB)	
		Rp (juta)	Persen
1	Pertanian	-148.445,60	-13,16
2	Pertambangan dan Penggalian	-2.766,21	-17,93
3	Industri Pengolahan	-6.449,63	-6,51
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	913,50	3,19
5	Bangunan	3.063,94	3,07
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	85.432,82	8,60
7	Pengangkutan dan Komunikasi	9.873,60	9,74
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	-4.066,12	-4,23
9	Jasa-jasa	-15.306,29	-2,99
	Total	-77.749,98	-20,23

Sumber : BPS Kabupaten Madiun, diolah

Sektor yang memiliki $PB > 0$ adalah sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 3,19%, sektor bangunan sebesar 3,07%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 8,61%, serta sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 9,74%. Sedangkan sektor yang Arsyad, Lincoln, 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan*

memiliki $PB < 0$ adalah sektor pertanian (-13,16%), sektor pertambangan dan penggalian (-17,94%), sektor industri pengolahan (-6,51%), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (-4,23%), serta sektor jasa-jasa (-2,99%).

Simpulan dan saran

Penelitian yang telah dilakukan ini memberikan beberapa kesimpulan yang akan dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 7
Hasil analisis dengan tiga pendekatan

	Hasil penelitian	Keterangan
Jenis alat analisis		
Tipologi Klassen	1. Sektor pertanian 2. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 3. Sektor jasa-jasa	Sektor maju dan tumbuh pesat
Location Quotient	1. Sektor Pertanian 2. Sektor perdagangan, hotel dan restoran 3. Sektor jasa-jasa	Sektor basis Kabupaten Madiun
Shift Share	1. Pengangkutan dan komunikasi 2. Listrik, gas dan air bersih	Sektor maju (berdaya saing)

REFERENSI

- Adisasmita, R, 2008. *Ekonomi Archipelago*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ambardi, Urbanus M dan Socia Prihawantoro. 2002. *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah*. Pusat pengkajian kebijakan pengembangan wilayah (P2KTPW – BPPT). Jakarta.
- Ekonomi Daerah*. BPFE, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2013.

- Kabupaten Madiun Dalam Angka*. BPS Kabupaten Madiun. Madiun.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Propinsi Jawa Timur Dalam Angka*. BPS Propinsi Jawa Timur. Surabaya.
- Budiharsono, S. 2001. *Teknik Pengembangan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Glasson, J. 1977. *Pengantar Perencanaan Regional*. Terjemahan Paul Sitohang. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Rachbini, Didik J, 2001. *Pembangunan Ekonomi & Sumber Daya Manusia*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sirojuzilam, 2008. *Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur Provinsi Sumatera Utara*, Pustaka Bangsa Press.
- Soekarwo, dkk. 2015. *Pintu Gerbang MEA 2015 Harus Dibuka*. Prenadamedia Group. Cetakan ketiga. Jakarta.
- Tambunan, Tulus T. H, 2001. *Transformasi Ekonomi di Indonesia: Teori & Penemuan Empiris*. Salemba Empat Jakarta.
- Tarigan, Robinson, 2007. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*, PT. Bumi Aksara, Cetakan Keempat, Jakarta.
- Usya, Nurlatifa. 2006. *Analisis Struktur Ekonomi dan Identifikasi Sektor Unggulan Di Kabupaten Subang*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Bogor.